

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA TANA TORO

Majida¹, Muhammad Ikbal², Hardianti³

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email: majida.adm@umsrappang.ac.id

Kata kunci Peran Pemerintah Desa, UMKM, Pendapatan Masyarakat, Fungsi Administrasi Publik, NVivo, Desa Tana Toro.	Abstrak Pengelolaan UMKM di Desa Tana Toro, Kabupaten Sidenreng Rappang, masih bersifat konvensional pada potensi lokal seperti gula aren dan kopi bubuk. Keterbatasan manajemen bisnis modern dalam tata kelola produksi, diversifikasi, pengemasan, dan pemasaran menyebabkan rendahnya nilai tambah serta daya saing produk. Pelaku usaha menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan kapasitas SDM, manajemen keuangan, modal, dan integrasi teknologi digital. Penelitian ini menganalisis peran pemerintah desa melalui fungsi regulator, fasilitator, dan katalisator (Siagian, 2002), serta faktor penghambat dari aspek SDM, permodalan, dan pemasaran (Adiningsih, 2001). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berparadigma post-positivisme, data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dengan 9 informan, dan dokumentasi, yang diolah menggunakan NVivo untuk menghasilkan visualisasi word cloud, project map, coding coverage, serta hierarchy chart. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah desa belum optimal. Fungsi regulator masih lemah akibat ketiadaan Peraturan Desa khusus UMKM. Peran fasilitator berjalan baik lewat bantuan bibit kopi, pelatihan pengolahan/pengemasan, program PKK, dan alat. Peran katalisator cukup efektif mendorong motivasi berwirausaha. Meski berdampak positif meningkatkan pendapatan keluarga dan membuka lapangan kerja alternatif luar pertanian musiman, akselerasi UMKM tetap terhambat oleh keterbatasan kapasitas SDM, financial gap, dan jangkauan pemasaran yang terbatas pada pasar lokal..
Keywords Village Government Role, MSMEs, Community Income, Public Administration, NVivo Analysis, Tana Toro Village.	Abstract Management of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tana Toro Village, Sidenreng Rappang Regency, remains largely conventional, focusing on local commodities such as palm sugar and ground coffee. The lack of modern business management in production governance, product diversification, packaging, and marketing results in low added value and competitiveness. Entrepreneurs face structural challenges, including limited human resource capacity, weak financial management, capital constraints, and minimal digital technology integration. This study analyzes the role of village government through regulator, facilitator, and catalyst functions (Siagian, 2002), alongside inhibiting factors in HR, capital, and marketing (Adiningsih, 2001). Using a descriptive qualitative approach grounded in a post-positivism paradigm, data were collected via observation, in-depth

interviews with nine informants, and official documentation, processed using NVivo to generate word cloud, project map, coding coverage, and hierarchy chart visualizations. Findings reveal that the village government's role is not yet optimal. The regulatory role remains weak due to the absence of specific Village Regulations on MSMEs. The facilitator role functions well through coffee seed distribution, training, and equipment assistance, while the catalyst role effectively motivates entrepreneurship. Although MSME development boosts family income and provides alternative non-seasonal agricultural livelihoods, business acceleration remains constrained by limited HR capacity, financial gaps, and restricted local market reach..

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan pilar fundamental dalam struktur pembangunan nasional Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan transformasi ekonomi nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana komunitas desa mampu mengoptimalkan potensi lokalnya untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri. Dalam konteks perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang amat vital dan strategis. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,07% atau setara dengan Rp 8,5 triliun, serta menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian, 2021). Angka statistik ini menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar entitas bisnis berskala kecil, melainkan tulang punggung penyangga stabilitas perekonomian nasional yang berdaya tahan tinggi terhadap gejolak krismon dan ketidakpastian global.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kerangka usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berasas pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha Mikro dirancang sebagai kegiatan ekonomi produktif yang mampu memperluas kesempatan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta berperan aktif dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mewujudkan stabilitas nasional (Triningsih & Widyasari, 2010; Umkm et al., 2017). Landasan filosofis pemberdayaan ekonomi wirausaha masyarakat juga memiliki keterkaitan spiritual yang kuat. Dalam ajaran Islam, kegiatan perdagangan dan jual beli yang jujur serta produktif merupakan modalitas syariah yang sangat dimuliakan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Prinsip etika bisnis Islam ini menuntut agar pengelolaan usaha rakyat didasari oleh prinsip keadilan, kehalalan, kejujuran, dan produktivitas yang membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan bersama.

Seiring dengan bergulirnya otonomi desa melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan pemerintah desa mengalami pergeseran

paradigma yang sangat mendasar. Pemerintah desa tidak lagi sekadar perpanjangan tangan administratif birokrasi pemerintah di tingkat bawah, melainkan bertindak sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah desa dituntut untuk bertindak sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pembangunan ekonomi lokal. Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) memberikan ruang diskresi yang luas bagi aparatur desa untuk mengalokasikan sumber daya keuangan publik guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pembinaan wirausaha desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi warga (Ratnasari et al., 2021).

Secara teoritis, peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat menurut Sondang P. Siagian (2002) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga peranan utama, yaitu: (1) *Regulator*, di mana pemerintah bertugas menetapkan landasan hukum, kebijakan, aturan main, dan regulasi yang kondusif guna menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat; (2) *Fasilitator*, di mana pemerintah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana prasarana, bantuan permodalan, akses pelatihan, pendampingan teknis, dan infrastruktur penunjang ekonomi; serta (3) *Katalisator*, di mana pemerintah berperan sebagai akselerator, motivator, dan pendorong partisipasi aktif masyarakat agar tergerak menciptakan inovasi serta memanfaatkan peluang ekonomi secara mandiri. Apabila ketiga peranan ini dijalankan secara sinergis dan terpadu oleh pemerintah desa, maka potensi ekonomi lokal berbasis unit UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

Desa Tana Toro, yang terletak di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan wilayah pedesaan yang memiliki bentang alam subur dengan luas wilayah 137 km². Secara sosiologis dan ekonomis, mayoritas masyarakat Desa Tana Toro menggantungkan mata pencaharian utamanya pada sektor pertanian komoditas padi dan perkebunan. Namun demikian, sektor pertanian padi di desa ini cenderung bersifat musiman dan sangat rentan terhadap fluktuasi iklim, ketidakpastian cuaca, tantangan hama, serta dinamika harga pasar saat panen raya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan rumah tangga petani bersifat fluktuatif dan tidak menentu sepanjang tahun. Di samping komoditas padi, Desa Tana Toro memiliki kekayaan potensi hasil perkebunan dan hutan rakyat yang amat menjanjikan, seperti kelapa aren (penghasil nira/gula merah), tanaman kopi, cengkeh, merica, cokelat, kemiri, serta aneka buah-buahan lokal seperti durian, langsung, dan rambutan.

Di antara berbagai potensi tersebut, usaha pengolahan gula aren (gula merah) dan usaha pengolahan kopi bubuk di Dusun V Tabaro Desa Tana Toro merupakan kegiatan wirausaha berbasis tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan komoditas padi yang dipanen secara musiman, penderasan nira aren dan pengolahan kopi memiliki frekuensi produksi yang konsisten sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan harian dan bulanan yang stabil bagi rumah tangga pedesaan. Namun demikian, penelusuran awal di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan UMKM di

Desa Tana Toro masih dihadapkan pada berbagai kendala mendasar. Proses produksi gula aren dan pengolahan kopi masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan peralatan seadanya, manajemen sanitasi yang minim, serta standar pengemasan (*packaging*) yang amat sederhana tanpa label merk yang menarik. Akibatnya, nilai jual produk di pasaran tergolong rendah dan posisi tawar (*bargaining power*) pengrajin di hadapan pedagang pengumpul (tengkulak) sangat lemah.

Di sisi lain, para pelaku UMKM di Desa Tana Toro memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan manajemen keuangan usaha, belum mampu memisahkan antara uang belanja rumah tangga dengan kas modal usaha, serta belum memanfaatkan sarana teknologi informasi dan media sosial untuk pemasaran digital. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan modal kerja untuk membeli mesin pengolahan modern dan minimnya pendampingan usaha yang berkesinambungan dari pemerintah desa. Merujuk pada pemikiran Sri Adiningsih (2001), pengembangan UMKM di negara berkembang pada umumnya terkendala oleh tiga simpul

masalah utama, yaitu: (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup kesenjangan manajerial, rendahnya literasi bisnis, dan keterlambatan adaptasi teknologi; (2) Keterbatasan Permodalan (*financial gap*) akibat persyaratan perbankan yang kaku dan minimnya akses pembiayaan formal; serta (3) Keterbatasan Pemasaran akibat isolasi geografis, keterbelakangan informasi pasar, serta ketidakmampuan menembus rantai pasok modern.

Joseph Schumpeter, seorang tokoh ekonomi terkemuka, menegaskan dalam teorinya bahwa inovasi adalah ruh utama dari kewirausahaan, di mana wirausahawan bertindak sebagai agen perubahan ekonomi (*agents of economic change*) yang melakukan kombinasi baru atas sumber daya lokal. Sejalan dengan pandangan tersebut, Zimmerer dan Scarborough (2008) menekankan pentingnya UMKM dalam menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat fondasi ekonomi lokal, serta meningkatkan ketahanan ekonomi warga. Oleh karena itu, guna menjembatani tantangan struktural yang dihadapi oleh wirausaha pedesaan di Desa Tana Toro, peranan aktif pemerintah desa sebagai institusi publik terdekat dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Kebijakan publik desa yang progresif, skema fasilitasi bantuan yang tepat sasaran, serta dorongan motivasional yang konstan diharapkan mampu mengtransformasi UMKM tradisional menjadi unit usaha yang profesional, berdaya saing, dan berorientasi pasar.

Kajian ilmiah mengenai peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Euis Hasnmita Putri (2017) dalam penelitiannya mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda, yang menyimpulkan bahwa pembinaan pemerintah kota berjalan efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha masyarakat urban. Ester Veronika et al. (2025) meneliti peran UMKM di Kota Depok dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Sementara itu, Zahra dan Sagita (2023) menganalisis efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (JakPreneur) dalam memfasilitasi akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Meskipun studi terdahulu telah memberikan kontribusi akademik yang berharga, mayoritas kajian terdahulu berfokus pada ekosistem UMKM di wilayah perkotaan (*urban setting*) dengan tingkat pemerintahan dinas atau pemerintah daerah kota. Masih terdapat kekosongan literatur (*literature gap*) terkait bagaimana peranan pemerintah desa dalam tataran administrasi pemerintahan terkecil dalam memfasilitasi dan mengkatalisasi UMKM berbasis potensi alam pedesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemanfaatan perangkat lunak analisis kualitatif canggih seperti NVivo untuk memetakan keterkaitan variabel peranan pemerintah dan kendala UMKM secara rinci di tingkat desa masih sangat terbatas. Berdasarkan uraian latar belakang empiris dan teoritis tersebut, naskah paper ilmiah ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi peranan pemerintah desa (sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator) di Desa Tana Toro, menganalisis faktor-faktor penghambat yang melingkupinya, serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai sangat tepat untuk menelaah fenomena sosial dan tindakan administratif publik dalam kondisi yang alami (*natural setting*) tanpa adanya intervensi atau manipulasi eksperimental (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini berlandaskan pada paradigma post-positivisme, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan memiliki hubungan gejala yang bersifat interaktif (reciprocal). Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*human instrument*) yang mengumpulkan data secara induktif guna mengonstruksi pemahaman yang mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam menggerakkan UMKM di Desa Tana Toro.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus area pendalaman di Dusun V Tabaro. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara disengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Dusun V Tabaro merupakan pusat konsentrasi para pelaku UMKM pengolahan kopi bubuk dan gula aren, serta menjadi area fokus program bantuan fasilitas ekonomi oleh Pemerintah Desa Tana Toro. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurun waktu tiga bulan, terhitung mulai tanggal 13 Maret hingga 13 Mei 2026, yang mencakup tahapan pra-lapangan, pengumpulan data awal, pelaksanaan wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta verifikasi dokumen resmi.

Tabel 1. Rencana dan Matriks Pelaksanaan Tahapan Penelitian (2025–2026)

No	Tahapan Kegiatan Penelitian	Waktu Pelaksanaan	Output / Sasaran Kegiatan
1	Observasi Awal & Pengumpulan Data Lapangan	September – November 2025	Identifikasi awal potensi UMKM gula aren & kopi
2	Penyusunan Proposal & Ujian Seminar Proposal	Desember 2025 – Februari 2026	Penyempurnaan instrumen & metodologi penelitian
3	Pengumpulan Data Primer (Wawancara & Dokumentasi)	13 Maret – 13 Mei 2026	Transkrip wawancara 9 informan & foto arsip
4	Pengolahan & Analisis Data Software NVivo	Mei – Juni 2026	Koding node, word cloud, project map & chart
5	Penyusunan Laporan Akhir & Ujian Skripsi/Paper	Juni – Juli 2026	Naskah karya ilmiah terstruktur IMRAD lengkap

Fokus penelitian ini dibatasi pada dua ranah utama untuk menjaga kedalaman analisis. Pertama, analisis peranan pemerintah desa yang dibedah berdasarkan tri-fungsi peranan menurut Siagian (2002), yaitu: (a) Peran sebagai regulator; (b) Peran sebagai fasilitator; dan (c) Peran sebagai katalisator. Kedua, analisis faktor penghambat pengembangan UMKM yang dikaji berdasarkan tipologi kendala usaha menurut Adiningsih (2001), meliputi aspek: (a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); (b) Keterbatasan Modal Usaha; dan (c) Keterbatasan Akses Pemasaran.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi tiga teknik (triangulasi teknik) guna memastikan kelengkapan data primer dan sekunder:

1. Observasi Partisipatif Pasif: Peneliti melakukan pengamatan langsung secara cermat terhadap aktivitas proses produksi kopi bubuk dan gula aren, kondisi fasilitas alat usaha, interaksi transaksi jual beli di tingkat pengrajin, serta bentuk layanan administrasi dan pembinaan di Kantor Desa Tana Toro.
2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Wawancara terstruktur dan semiterstruktur dilakukan terhadap 9 orang informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan relevansi wewenang, keterlibatan, dan pemahaman objek. Informan terdiri dari: Kepala Desa Tana Toro (Abdullah Paba, S.IP., M.A.P), Sekretaris Desa, Perangkat Desa (Sekdes II), Pemilik UMKM Kopi Bubuk, Pemilik UMKM Menjahit, Pelaku UMKM Warung Sembako/Gorengan, serta tokoh masyarakat lokal.
3. Studi Dokumentasi: Pengumpulan dokumen resmi desa meliputi Peta Desa Tana Toro, Data Monografi Demografi, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Foto Kegiatan Pelatihan, serta Surat Keterangan Penelitian Resmi Nomor: 100.3/93/ DTT/VI/2026.

Uji keabsahan data (*data trustworthiness*) dilakukan secara ketat menggunakan kriteria kredibilitas (*credibility*). Peneliti mengimplementasikan tiga strategi uji kredibilitas: (1) *Perpanjangan Pengamatan*, di mana peneliti tinggal dan berinteraksi di lokasi Dusun V Tabaro hingga data mencapai titik jenuh (*saturation point*); (2) *Peningkatan Kecermatan*, yaitu membaca ulang literatur secara konsisten serta merevisi transkrip hasil wawancara secara kronologis; dan (3) *Triangulasi Data*. Triangulasi dilakukan baik secara triangulasi sumber (membandingkan data wawancara antara aparat desa, pelaku UMKM, dan masyarakat), triangulasi teknik (mengonfrontasi data wawancara dengan hasil observasi dan isi dokumen), maupun triangulasi waktu pengumpulan data.

Teknik analisis data kualitatif mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang diintegrasikan secara sistematis dengan perangkat lunak analisis kualitatif NVivo. Integrasi teknologi NVivo bertujuan untuk meningkatkan transparansi, objektivitas, ketelitian coding, serta keabsahan visualisasi data kualitatif. Tahapan analisis data meliputi:

1. Impor Data (Data Import): Seluruh transkrip wawancara 9 informan, catatan lapangan observasi, dan dokumen regulasi dimasukkan ke dalam basis data NVivo sebagai file sumber (*sources*).
2. Coding Data (Data Coding & Node Creation): Peneliti melakukan proses penandaan dan pengelompokan teks (*coding*) ke dalam simpul-simpul konsep (*nodes*) berdasarkan kategori teori, seperti Peran Regulator, Peran Fasilitator, Peran Katalisator, Kendala SDM, Kendala Modal, dan Kendala Pemasaran.
3. Kategorisasi dan Pemetaan Tema (*Categorization & Queries*): Menggunakan fitur *Word Frequency Query*, *Matrix Coding Query*, dan *Crosstab Query* untuk menemukan dominasi isu, korelasi antar variabel, dan kontribusi informan.
4. Visualisasi Data Kualitatif (*Data Visualization*): Menghasilkan output grafis NVivo berupa *Word Cloud*, *Project Map*, *Coding Coverage Item Chart*, dan *Hierarchy Chart* untuk mendukung interpretasi naratif secara empiris.
5. Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (*Conclusion Drawing*): Merumuskan simpulan teoritis dan praktis secara menyeluruh berdasarkan pola hubungan antar-kategori data yang terverifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Demografi dan Geografis Lokasi Penelitian

Desa Tana Toro merupakan salah satu dari 12 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data monografi Kantor Desa Tana Toro (Mei 2026), desa ini memiliki luas wilayah 137 km² (13.700 Ha) dan terletak sekitar 15 km dari ibu kota kecamatan serta 54 km dari ibu kota kabupaten (Pangkajene). Batas administrasi wilayah Desa Tana Toro meliputi: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Latimojong (Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang), sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batu, sebelah Timur berbatasan dengan

Desa Leppangeng, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banua Bungin.

Penggunaan lahan di Desa Tana Toro didominasi oleh kawasan perkebunan dan pertanian, dengan rincian luas persawahan mencapai 308,95 Ha dan luas perkebunan seluas 221,2 Ha. Secara demografis, populasi penduduk Desa Tana Toro tercatat sebanyak 1.942 jiwa yang terbagi dalam 602 Kepala Keluarga (KK), terdiri atas 1.025 jiwa laki-laki dan 917 jiwa perempuan. Sebagian besar mata pencaharian warga berada di sektor perkebunan dengan mengelola komoditas cengkeh, merica, cokelat, kopi, kemiri, serta usaha pengolahan gula merah (gula aren) dan warung mikro. Visi utama Desa Tana Toro adalah *"Mewujudkan masyarakat desa yang maju dan makmur didukung oleh hasil perkebunan dan pertanian yang bagus serta akses transportasi yang baik."*

2. Hasil Analisis Data Kualitatif Berbantuan Software NVivo

Proses pengolahan transkrip wawancara dan data dokumen menggunakan perangkat lunak NVivo memunculkan beberapa visualisasi struktural yang menggambarkan fokus isu dan dinamika empiris di Desa Tana Toro.

A. Analisis Frekuensi Kata (Word Cloud Analysis):

Berdasarkan hasil eksekusi Word Frequency Query pada NVivo, kata-kata yang paling dominan muncul dalam transkrip data adalah: usaha, pemerintah, masyarakat, pelatihan, modal, pemasaran, bantuan dan meningkatkan. Dominasi kata **usaha** menegaskan bahwa kegiatan UMKM merupakan pusat perhatian sosial-ekonomi warga. Kemunculan kata pemerintah dan pelatihan mengindikasikan adanya intervensi dari birokrasi desa. Namun, tingginya frekuensi kata dan memperkuat bukti awal bahwa isu permodalan dan keterbatasan jalur distribusi pasar merupakan hambatan paling krusial yang dialami pelaku usaha.

B. Pemetaan Hubungan Aktor dan Program (Project Map Analysis):

Visualisasi *Project Map* pada NVivo memetakan keterkaitan antara aktor (Kepala Desa, Sekdes, Pengusaha Kopi, Penjahit, Pedagang) dengan node program. Terlihat bahwa intervensi pemerintah desa terhubung secara langsung dengan dukungan bibit kopi, pelatihan pengemasan produk, dan fasilitasi pameran lokal. Namun, struktur peta menunjukkan bahwa pola hubungan antara pemerintah desa dan pelaku UMKM masih bersifat top-down partisipatif, di mana pemerintah menjadi inisiator utama program, sedangkan kolaborasi antar-pelaku UMKM secara mandiri (kemitraan horisontal) masih relatif terbatas.

C. Distribusi Cakupan Koding Informan (Coding Coverage Item):

Visualisasi matriks *Coding Coverage* menunjukkan persentase kontribusi narasi dari masing-masing informan terkait isu peranan pemerintah desa:

Tabel 2. Persentase Coverage Koding NVivo Berdasarkan Kategori Informan

Kategori Informan / Responden	Persentase Coverage Teks (%)	Fokus Isu Utama yang Disampaikan
Kepala Desa (Abdullah Paba, S.IP., M.A.P)	30%	Kebijakan desa, alokasi anggaran, bantuan bibit kopi & visi pemberdayaan
Sekretaris Desa (Sekdes)	23%	Mekanisme administrasi dana desa, program pelatihan, data UMKM
Perangkat Desa (Sekdes II & Kaur)	14%	Pelaksanaan teknis lapangan, pendampingan kelompok tani & PKK
Pelaku UMKM (Pengusaha Kopi & Penjahit)	18%	Kebutuhan alat produksi modern, kemasan, kendala modal & harga pasar
Masyarakat Umum & Pedagang Sembako	15%	Dampak terhadap pendapatan harian, harapan bantuan permodalan langsung

D.Struktur Dominasi Isu Harapan (Hierarchy Chart Analysis):

Output *Hierarchy Chart* menunjukkan bahwa dalam kategori harapan masyarakat desa ke depan, blok "Bantuan Permodalan Langsung" dan "Pelatihan Lanjutan Manajemen & Pemasaran Digital" menempati proporsi terluas. Hal ini menandakan bahwa program pembinaan di masa mendatang perlu mengkombinasikan antara injeksi permodalan terstruktur dengan peningkatan kapasitas teknis (skills) wirausaha secara simultan.

3. Evaluasi Implementasi Peran Pemerintah Desa Tana Toro

A. Peran Sebagai Regulator

Berdasarkan hasil temuan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen regulasi desa, peranan Pemerintah Desa Tana Toro sebagai regulator belum berjalan secara optimal. Hingga saat penelitian dilakukan, Pemerintah Desa Tana Toro belum memiliki kebijakan tertulis dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Desa.

Pengaturan mengenai dukungan UMKM masih bersifat umum dan menumpang pada regulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahunan serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Keputusan alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi disepakati melalui forum Musyawarah Desa (Musrenbangdes). Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Tana Toro "*Secara regulasi khusus dalam bentuk Perdes UMKM memang kita belum menerbitkannya secara tersendiri. Namun, keberpihakan kebijakan anggaran tetap kita wujudkan melalui kesepakatan Musrenbangdes, di mana sebagian alokasi Dana Desa kita arahkan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pengadaan bibit komoditas unggulan dan pelatihan keterampilan.*" (Wawancara, 14 April 2026).

Ketiadaan Perdes khusus ini menyebabkan program pengembangan UMKM belum memiliki kerangka kerja jangka panjang yang berkepastian hukum dan sistematis, sehingga program cenderung berganti sesuai dinamika kepemimpinan atau ketersediaan alokasi anggaran tahunan.

B. Peran Sebagai Fasilitator

Peranan sebagai fasilitator merupakan fungsi yang paling nyata dan aktif dijalankan oleh Pemerintah Desa Tana Toro. Pemerintah desa telah memfasilitasi berbagai aspek penunjang usaha masyarakat, antara lain:

1. Fasilitasi Bantuan Bibit dan Sarana Produksi: Pemerintah desa secara berkala mendistribusikan bantuan bibit tanaman kopi unggulan secara gratis kepada para petani dan pengrajin di Dusun V Tabaro untuk menjamin ketersediaan bahan baku kopi berkualitas.
2. Fasilitasi Pelatihan Keterampilan dan Pengolahan: Menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis mengenai tata cara sangrai (*roasting*) kopi, pengolahan higienis gula aren, serta teknik pengemasan (*packaging*) produk agar tampil lebih menarik dan tahan lama.
3. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PKK & P2B): Menggerakkan organisasi Tim Penggerak PKK desa melalui program Pemanfaatan Pekarangan dan Bahan Lokal (P2B) untuk mendorong ibu-ibu rumah tangga membuat produk olahan pangan bernilai jual.
4. Fasilitasi Pemasaran Lokal: Membantu mengikutsertakan produk kopi bubuk Tabaro dan gula aren Tana Toro dalam pameran UMKM tingkat kecamatan dan kabupaten Sidrap.

Seorang pelaku UMKM pengolah kopi bubuk di Dusun V Tabaro menyatakan manfaat dari fasilitasi tersebut: *"Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan bibit kopi gratis dan pelatihan pengemasan dari desa. Dulu kopi kami hanya dibungkus plastik polos biasa, sekarang sudah pakai kemasan aluminium foil bermerk sehingga bisa dijual ke luar desa dengan harga lebih tinggi."* (Wawancara, 20 April 2026).

C. Peran Sebagai Katalisator

Fungsi katalisator ditunjukkan melalui upaya aparat desa dalam membangun kesadaran, motivasi, dan mentalitas berwirausaha di tengah masyarakat. Kepala Desa bersama para Kepala Dusun secara rutin memanfaatkan momentum pertemuan warga, rapat desa, dan sosialisasi keagamaan untuk mengimbau masyarakat agar tidak hanya bergantung pada hasil tani mentah musiman, tetapi berani mengolah hasil bumi menjadi produk jadi yang bernilai tambah tinggi.

Pemerintah desa bertindak sebagai pendorong partisipasi aktif warga agar memanfaatkan peluang usaha mikro seperti warung sembakau, usaha jahit, dan pengolahan gula merah. Dorongan motivasional ini terbukti berhasil merangsang tumbuhnya unit-unit usaha baru di tingkat rumah tangga.

4. Analisis Faktor Penghambat Pengembangan UMKM

Meskipun intervensi pemerintah desa telah memberikan stimulus positif, proses akselerasi UMKM di Desa Tana Toro masih terbentur oleh tiga kendala mendasar sebagaimana dirumuskan dalam teori Adiningsih (2001):

A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

Tingkat pendidikan formal pelaku UMKM yang rata-rata berpendidikan dasar/menengah menyebabkan timbulnya kesenjangan manajerial (*managerial gap*). Sebagian besar pemilik usaha mengelola bisnis secara konvensional berdasarkan insting tanpa perencanaan tertulis. Pencatatan keuangan usaha masih menyatu dengan keuangan rumah tangga. Selain itu, terdapat hambatan psikologis dan teknis dalam mengadopsi teknologi digital untuk promosi e-commerce dan pembayaran non-tunai.

B. Keterbatasan Modal Usaha (Financial Gap):

Permodalan merupakan kendala utama yang dikeluhkan oleh hampir seluruh informan pelaku usaha. Usaha mikro di Desa Tana Toro umumnya didirikan dengan modal mandiri yang sangat terbatas. Pelaku UMKM sulit mengakses kredit perbankan formal (KUR) karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan administrasi pembukuan standar dan ketiadaan agunan fisik yang memadai. Keterbatasan modal ini menghambat pelaku usaha untuk membeli mesin sangrai kopi modern, alat pencetak gula aren otomatis, atau menambah persediaan bahan baku.

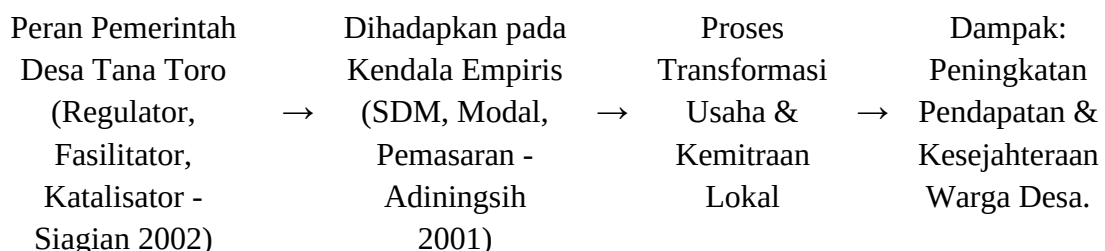
C. Keterbatasan Akses Pemasaran:

Pemasaran produk UMKM Desa Tana Toro masih bersifat pasif dan terisolasi pada cakupan geografis lokal (antar-tetangga dan pasar desa). Pelaku usaha belum menguasai teknik *digital marketing* melalui platform media sosial (Instagram, TikTok, WhatsApp Business) maupun marketplace e-commerce. Akibatnya, saat terjadi lonjakan produksi, produk kerap menumpuk dan rentan dipermainkan harganya oleh pedagang perantara (tengkulak).

Pembahasan

Temuan empiris dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika administrasi publik dan pemberdayaan ekonomi di tingkat pemerintahan desa. Diskusi ilmiah ini membedah hubungan sintesis antara temuan lapangan dengan kerangka teoritis Tri-Peran Pemerintah (Siagian, 2002) dan Teori Kendala UMKM (Adiningsih, 2001), serta mengonfrontasikannya dengan literatur empiris bereputasi.

Kerangka Konseptual Integratif Analisis Penelitian:



Dalam ranah Peran Regulator, ketidakhadiran Peraturan Desa (Perdes) khusus mengenai UMKM di Desa Tana Toro mencerminkan fenomena umum dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, di mana fungsi regulatif sering kali terabaikan dibandingkan fungsi eksekusi anggaran. Ketidadaan payung hukum berupa Perdes menyebabkan program pembinaan UMKM kurang memiliki kepastian hukum jangka panjang dan rentan terhadap ketidakberlanjutan apabila terjadi pergantian kepemimpinan desa. Regulasi desa idealnya berfungsi menciptakan *enabling environment* (lingkungan yang memfasilitasi), misalnya dengan menetapkan alokasi minimal dari Dana Desa untuk penyertaan modal BUMDes yang khusus memfasilitasi UMKM, atau memberikan perlindungan harga komoditas lokal dari spekulasi tengkulak. Hal ini sejalan dengan pandangan Ayu Hapsari et al. (2022) yang menyatakan bahwa regulasi daerah dan desa yang afirmatif merupakan syarat mutlak untuk melindungi UMKM dalam rantai kemitraan usaha.

Dalam ranah Peran Fasilitator, intervensi Pemerintah Desa Tana Toro melalui pembagian bibit kopi unggulan, pelatihan teknik pengemasan, dan program PKK P2B terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas produk dan nilai jual. Bantuan fasilitasi ini berhasil mengubah pola produksi kopi bubuk tradisional menjadi produk olahan bernilai tambah (*value-added product*). Temuan ini mendukung teori kewirausahaan Joseph Schumpeter yang menekankan bahwa inovasi produk (seperti perubahan kualitas dan kemasan) merupakan kunci utama penciptaan nilai ekonomi baru. Dampak konkret dari fasilitasi ini adalah terciptanya tambahan pendapatan bagi rumah tangga pengrajin kopi dan gula aren, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan keluarga.

Namun demikian, efektivitas fasilitasi pemerintah desa masih terhalang oleh keberadaan *Financial Gap* (jurang pembiayaan) dan Keterbatasan SDM sebagaimana ditegaskan oleh Adiningsih (2001). Temuan analisis NVivo yang menunjukkan dominasi isu modal dan alat produksi mengonfirmasi bahwa bantuan pelatihan yang diberikan tanpa disertai kemudahan akses modal kerja akan mengalami titik jenuh (*bottleneck*). Pelaku UMKM yang telah memiliki keterampilan baru tetap tidak mampu meningkatkan kapasitas produksinya karena tidak memiliki dana untuk membeli peralatan modern. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah desa perlu mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro desa atau penjamin kemitraan usaha yang dapat menyalurkan pinjaman modal lunak bagi UMKM.

Dalam ranah Peran Katalisator dan dorongan pemasaran digital, ketertinggalan UMKM Desa Tana Toro dalam memanfaatkan e-commerce dan media sosial menjadi tantangan utama di era transformasi digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu Mardikaningsih (2023) serta Barus et al. (2023), penguasaan kapabilitas pemasaran digital (*social media marketing capabilities*) merupakan penentu utama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) UMKM saat ini. Pemerintah desa tidak cukup hanya memotivasi warga untuk berproduksi, tetapi harus bertindak sebagai katalisator digital dengan memfasilitasi pelatihan literasi digital, penyediaan titik Wi-Fi publik desa, serta pembentukan platform galeri digital desa untuk memasarkan produk-produk Tana Toro

secara luas ke luar wilayah kabupaten.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan di Desa Tana Toro memperkaya khazanah studi administrasi publik pedesaan. Berbeda dengan studi Euis Hasnmita Putri (2017) di Kota Samarinda atau Zahra & Sagita (2023) di Jakarta Utara yang memperlihatkan ekosistem UMKM perkotaan yang sudah terintegrasi dengan lembaga perbankan dan akselerator digital (JakPreneur), UMKM di Desa Tana Toro masih sangat bergantung pada peran direct pendampingan dan stimulus modal langsung dari birokrasi pemerintah desa. Oleh karena itu, sinergi antara tri-peran pemerintah desa, revitalisasi BUMDes, dan digitalisasi rantai pasok lokal menjadi strategi mutlak untuk mengeskalasi perekonomian Desa Tana Toro menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif, analisis data komprehensif menggunakan software NVivo, serta pembahasan ilmiah yang telah diuraikan, dapat ditarik simpulan utama sebagai berikut:

1. Implementasi Peran Pemerintah Desa: Peranan Pemerintah Desa Tana Toro dalam mengembangkan UMKM telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Peran sebagai *Regulator* masih lemah akibat belum diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) khusus mengenai UMKM. Peran sebagai *Fasilitator* telah berjalan efektif melalui pembagian bibit kopi unggulan, pelatihan pengolahan/pengemasan, program PKK P2B, serta fasilitasi pameran. Peran sebagai *Katalisator* berjalan cukup baik dalam memotivasi dan merangsang partisipasi wirausaha warga.
2. Dampak Terhadap Pendapatan Masyarakat: Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal (kopi bubuk dan gula aren) memberikan dampak positif nyata berupa peningkatan dan diversifikasi pendapatan rumah tangga, perluasan kesempatan kerja mandiri, serta pengurangan ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian padi musiman.
3. Faktor Penghambat Utama: Akselerasi UMKM di Desa Tana Toro dihambat oleh tiga faktor mendasar, yaitu:
(a) Keterbatasan kualitas SDM dalam hal manajemen keuangan dan literasi teknologi digital; (b) Keterbatasan modal usaha dan akses pembiayaan formal (*financial gap*); serta (c) Keterbatasan akses pemasaran yang masih terbatas pada pasar lokal konvensional.

Referensi

- Adiningsih, S. (2001). *Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Strategi Kebijakan*. Jakarta: FE UI Press.
- Ayu Hapsari, R., Satria, I., & Hesti, Y. (2022). Perspektif Hukum Dalam Kebijakan Relaksasi Pengenaan Hukum Persaingan Usaha Dan Pengawasan Kemitraan UMKM. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(2), 115-120.

- Barus, D. R., Simamora, H. N., Sihombing, M. G. S., Panjaitan, J., & Saragih, L. S. (2023). Tantangan dan Strategi Pemasaran UMKM di Era Teknologi dan Digitalisasi. *Journal of Creative Student Research*, 1(6), 357-365.
- Cay, S., & Irnawati, J. (2020). Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus UMKM di Tangerang Selatan). *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, 4(2), 160-170.
- Fadilah, A., Syahidah, A. N., Risqiana, A., Nurmaulida, A. S., Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892-896.
- Itmamiy, A. L., & Sucipto, S. (2022). Efektivitas Manajemen Produksi dan Manajemen Biaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha UMKM. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 41-55.
- Januari, N., Rohmaniyah, R., Fitrianti, R. N., Alfian, N., & Fajar, A. (2024). Manajemen Keuangan Rumah Tangga Dalam Meningkatkan UMKM di Desa Majungan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 2(1), 12-24.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2021). *Eksistensi dan Kontribusi UMKM Dalam Menopang Perekonomian Nasional di Masa Pandemi*. Jakarta: Siaran Pers Kemenko Perekonomian.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Putri, E. H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 5432-5445.
- Putri, L. R., Hidayat, A. N., & Suhana, S. (2024). Peran UMKM Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menengah Kebawah. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 2(3), 207-217.
- Rahayu Mardikaningsih. (2023). Strategi Inovasi dan Pemasaran Media Sosial Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, 6(2), 58-67.
- Ratnasari, D., Kusuma, A., & Suharso, S. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik dan Otonomi Daerah*, 3(1), 88-102.
- Siagian, S. P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33-59.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, K. T. P. (2022). Penguasaan dan Posisi Tawar Dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang Penguasaan Dalam Perjanjian Kemitraan. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 91-99.

- Triningsih, A., & Widyasari, R. (2010). Pembinaan dan Pemodelan Hukum Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 145-168.
- Veronika, E., Izti, I., Yunita, C., & Pebriyani, N. (2025). Peran UMKM di Kota Depok Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Regional*, 3(1), 45-58.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis Lokal*, 1(3), 101-112.
- Yasinta, Y. (2023). Pengembangan UMKM dengan Modul ILO SCORE. *Edukasi dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-11.
- Zahra, A. M., & Sagita, N. I. (2023). Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (JakPreneur) Dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. *Jurnal Kebijakan Publik & Administrasi*, 5(1), 260-274.
- Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2008). *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management* (5th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.